KEBIJAKAN STRATEJIK UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19

(STUDI KASUS INDEKS DESA MEMBANGUN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018-2020)

"Strategic Policies to Increase Social Resilience in the Middle of the Covid-19 Pandemic"

Fitriansyah
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email : 21fitriansyah@gmail.com
Atma Elfahdi
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email : adybelba17@gmail.com

Abstract

A village's social resilience can be seen from the Social Resilience Index as measured by the Village Development Index. This study aims to analyze how much is the contribution measurement dimensions of the Social Resilience Index on the Value of the Social Resilience Index of the Bangka Belitung Islands Province in 2020 and to determine policies to increase social resilience in the Province of the Bangka Belitung Islands. Data analysis uses descriptive analysis with a quantitative approach that uses the two-way ANOVA method, linear regression analysis, SWOT analysis, and strategy evaluation. Primary data was obtained from the Village Development Index measurements for 2018-2020, RPJMD 2017-2022, and RKPD in 2020 for the Province of the Bangka Belitung Islands and supported by the results of interviews with stakeholders.. The results showed that East Belitung Regency had the highest Social Resilience Index during the 2018-2020 period compared to other districts/provinces. The compiler of the Social Resilience Index which consists of 4 (four) dimensions either jointly or partially contribute the Social Resilience Index and social capital is the dimension with the largest contribution (40.82%). The policy to increase social resilience in the Bangka Belitung Islands Province prioritizes the aid budget at locus/village which allocates the budget for the maintenance of infrastructure assistance, development, and supervision of social assistance. Further research is needed to determine the contribution of implementing these policies on increasing social security in the following year.

Keywords:
Village Development Index, Social Resilience Index, Policies

Abstrak

Ketahanan sosial suatu desa dapat diketahui dari Indeks Ketahanan Sosial yang diukur dengan Indeks Desa Membangun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi dimensi pengukuran Indeks Ketahanan Sosial terhadap Nilai Indeks Ketahanan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 serta untuk menentukan kebijakan peningkatan ketahanan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode *two ways anova*, analisis regresi linier, analisis SWOT, dan evaluasi strategi. Data primer diperoleh dari data Indeks Desa Membangun Pengukuran Tahun 2018-2020, RPJMD 2017-2022, dan RKPD Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta didukung hasil wawancara dengan stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur memiliki Indeks Ketahanan Sosial yang paling tinggi selama periode Tahun 2018-2020 dibandingkan dengan kabupaten lain/provinsi. Penyusun Indeks Ketahanan Sosial yang terdiri dari 4 (empat) dimensi baik secara bersama-sama maupun secara parsial berkontribusi terhadap Indeks Ketahanan Sosial dan modal sosial merupakan dimensi dengan kontribusi terbesar (40,82%). Kebijakan peningkatan ketahanan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memprioritaskan anggaran bantuan pada lokus/desa yang mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan bantuan sarana prasarana, pembinaan, dan pengawasan bantuan sosial. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kontribusi penerapan kebijakan tersebut terhadap peningkatan ketahanan sosial di tahun berikutnya.

Kata Kunci:
Indeks Desa Membangun; Indeks Ketahanan Sosial; Kebijakan

PENDAHULUAN

Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang terjadi sejak awal Maret 2020 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor-sektor lain, termasuk sosial-ekonomi. Dalam upaya menangani dampak tersebut, sejak Maret 2020 pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain untuk mendukung daya beli masyarakat dan kegiatan usaha. Anggaran yang disediakan mengalami beberapa kali peningkatan seiring peningkatan intensitas dampak dan dinamika pengelolaan keuangan negara (Hastuti et al., 2020). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum dalam perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk desa melalui perluasan kewenangan desa dalam kebijakan dan anggaran. Beberapa kewenangan desa mendapatkan pengakuan baik yang berdasarkan hak asal-usul maupun skala (ruang lingkup) lokal dan menjadi strategi baru dalam pembangunan (Bachtiar et al., 2018).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi kepulauan yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota serta memiliki 309 desa yang tersebar di 6 (enam) kabupaten. Desa-desa tersebut tidak hanya berada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung tetapi juga di pulau-pulau kecil sehingga pemerataan pembangunan dan konektivitas menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, untuk menentukan strategi pembangunan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan desa. Strategi yang digunakan oleh satu desa dengan desa lainnya bisa saja berbeda karena menyesuaikan dengan program yang dimiliki kepala desa dan potensi desa yang ada (Afifah & Kusumastuti, 2018).

Untuk mewujudkan dan mengakselerasi pembangunan di desa, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak pandemi pada kesejahteraan masyarakat dengan melakukan penggeseran (*refocusing*) anggaran pada tiga aspek pokok, yaitu kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Dana Desa (DD) yang setiap tahun diterima desa secara rutin juga tak luput dari kebijakan penggeseran anggaran. Untuk mengetahui manfaat dari penggunaan dana desa terhadap keberhasilan pembangunan di desa dibutuhkan suatu metode pengukuran. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 memuat tentang Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi tolak ukur di dalam menentukan status perkembangan desa.

Evaluasi terhadap IDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari pengukuran tahun 2018-2020 menempatkan IKS sebagai indeks dengan kontribusi terbesar terhadap IDM sehingga program/kegiatan peningkatan IKS penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk meningkatkan ketahanan sosial desa-desa yang masih kurang tetapi juga untuk mempertahankan ketahanan sosial yang sudah baik.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari 4 (empat) dimensi penyusun yaitu kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman. Perangkat indikator dimensi penyusunnya ada 14 (empat belas) yaitu pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, jaminan kesehatan, akses pendidikan dasar-menengah, akses

pendidikan non formal, akses pengetahuan masyarakat, solidaritas sosial, toleransi, rasa aman warga desa, kesejahteraan sosial, akses air bersih layak minum, akses ke fasilitas sanitasi, akses ke fasilitas listrik, dan akses fasilitas komunikasi dan informasi. Tanggung jawab ketercapaian setiap indikator telah dibagi sesuai kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, dan sosial alami. (Kementerian Desa PDTT, 2020).

Peningkatan ketahanan sosial di desa dilakukan dengan cara meningkatkan capaian *output* dari setiap indikator dimensi penyusun Indeks Ketahanan Sosial. Ada banyak program/kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa baik yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan berkaitan dengan ketahanan sosial di desa. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PAMSIMAS, bantuan sosial provinsi, bantuan sosial kabupaten, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang permukiman, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, ada hibah dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang wilayah kerjanya meliputi wilayah administrasi desa. Keberadaan program tersebut berdampak positif terhadap desa-desa maupun keluarga penerima manfaat (KPM), akan tetapi keterbatasan dan ketidakpastian tersedianya anggaran setiap tahunnya menjadi hal yang harus diantisipasi.

Permasalahan terkait pemerataan penerima manfaat, keberlanjutan program /kegiatan, kemampuan pemeliharaan sarana prasarana dan sudah tepat sasaran atau belumnya pelaksanaan program/kegiatan masih ditemui di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini terlihat dari nilai IKS yang berbeda-beda di setiap kabupaten sehingga penting untuk mengetahui dimensi apa yang paling berkontribusi terhadap IKS. Selanjutnya, diperlukan identifikasi permasalahan yang komprehensif untuk menyusun alternatif strategi serta dalam menentukan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dimensi penyusun IKS terhadap nilai IKS serta dalam menentukan kebijakan peningkatan ketahanan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana kebijakan di tengah pandemi tersebut diharapkan dapat mempertahankan desa-desa yang sudah memiliki ketahanan sosial yang baik sekaligus meningkatkan desa-desa yang ketahanan sosialnya masih kurang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2016). Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk angka-angka yang bermakna (Sudjana, 2004).

1. Jenis Data

Data Primer di dalam penelitian ini meliputi hasil inputan kuisioner dan rekapan status perkembangan desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018-2020, dokumen RPJMD Periode 2017-2022 dan

RKPD Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta didukung wawancara dan observasi kepada pengelola Satuan Kerja dan tenaga ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 6 (enam) Aparatur Pemerintah Desa sebagai narasumber di dalam penginputan kuisioner Indeks Desa Membangun, 2 (dua) orang Analis Kebijakan dan Tim Penyusun RPJMD dan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data sekunder diperoleh dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, buletin, buku, dan artikel jurnal.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis keragaman (ANOVA), regresi linier berganda, analisis SWOT, dan Evaluasi Strategi. Data Indeks Analisis keberagaman digunakan untuk mengetahui kontribusi faktor pemerintah daerah dan tahun pengukuran dengan menganalisis data Indeks Ketahanan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018-2020 dengan tingkat signifikansi 95% dan apabila terdapat perbedaan signifikansinya dilanjutkan dengan uji Duncan's Multiple Range Test (DMRT). Data hasil pengujian ditampilkan dengan standar deviasi dan notasi huruf signifikansi. Analisis regresi linier berganda dipilih untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun bersama-sama. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Indeks Ketahanan Sosial, sedangkan variabel bebas terdiri dari 4 (empat) dimensi penyusun Indeks Ketahanan Sosial yaitu (1) kesehatan; (2) pendidikan; (3) modal sosial; dan (4) permukiman. Model regresi linier berganda untuk populasi dapat ditunjukkan sebagai berikut (Supranto, 2010) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_n X_n + e$$

Model regresi linier berganda untuk populasi diatas dapat ditaksir dengan model regresi linier berganda untuk sampel, yaitu :

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \cdots + b_k X_k$$

dengan :

Y	=	Variabel terikat (IKS)
b_0	=	Konstanta
$b_1, b_2, \ldots b_k$	=	Konstanta regresi linier
X	=	Variabel bebas (kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman)

Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) adalah suatu ukuran tentang seberapa besar variabel bebas dalam regresi mempunyai kontribusi atau sumbangan terhadap variabel terikat. Dengan menghitung SR dan SE dapat diketahui variabel bebas mana yang paling besar sumbangannya terhadap terbentuknya variasi dalam satuan-satuan variabel terikat regresi. Menurut Winarsunu (2006), perbedaan antara SR dan SE adalah SR menunjukkan ukuran besarnya sumbangan suatu prediktor terhadap jumlah kuadrat regresi, sedangkan SE merupakan ukuran sumbangan suatu prediktor terhadap keseluruhan efektivitas garis regresi yang digunakan sebagai dasar prediksi. Rumus sumbangan efektif dan sumbangan relatif sebagai berikut:

$$SE(X)\% = Beta_x \; x \; Koefisien \; korelasi \; x \; 100\%$$

$$SR(X)\% = \frac{SE(X)\%}{Rsquare}$$

Analisis SWOT adalah alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan

situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Analisis ini didasarkan agar dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities)*, yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) (Rachmat, 2014). Matriks SWOT dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal diantisipasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Pada penelitian ini, data analisis SWOT diperoleh dari rata-rata hasil skoring setiap butir pertanyaan pada kuisoner IDM. Matriks SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai strategi. Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus di arahkan pada usaha-usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang-peluang serta mengatasi ancaman. Sehingga dari matriks SWOT tersebut akan memperoleh empat kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT (Fahmi, 2014).

Keseluruhan strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT kemudian dievaluasi untuk mendapatkan strategi terbaik yang dapat dijadikan kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan ketahanan sosial. Evaluasi ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan oleh William N. Dunn. Menurut Dunn (2003), kriteria evaluasi kebijakan ada 6 (enam) yaitu efektifitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, kecukupan terhadap kebutuhan, perataan dalam pelaksanaan kebijakan, responsivitas, dan ketepatan program. Seluruh kriteria di-scoring 1-10, besar kecilnya score yang diperoleh mengacu pada penilaian terhadap program/kegiatan/subkegiatan serupa yang masih dan sudah pernah dilaksanakan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD 2017-2022 dan pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2020, kemudian hasilnya ditotal dan strategi dengan total skor terbesar dipilih sebagai rekomendasi kebijakan di dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

1. IKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020

IKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pengukuran tahun 2018-2020 dapat dilihat seperti pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa pada tahun 2018 IKS tertinggi berada di Kabupaten Belitung Timur dan terendah di Kabupaten Bangka Selatan. Pada pengukuran tahun 2019 dan 2020, IKS tertinggi tetap di Kabupaten Belitung Timur dan terendah di Kabupaten Bangka Barat (2019) dan Kabupaten Bangka (2020). Pada tahun 2018 IKS kabupaten yang berada diatas IKS provinsi yaitu Kabupaten Belitung Timur, Belitung, dan Bangka Tengah, sedangkan yang berada dibawah IKS provinsi yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, dan Bangka Barat. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 hanya Kabupaten Belitung Timur dan Belitung yang IKSnya diatas IKS provinsi sedangan IKS 4 (empat) kabupaten lainnya berada dibawah IKS provinsi yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat.

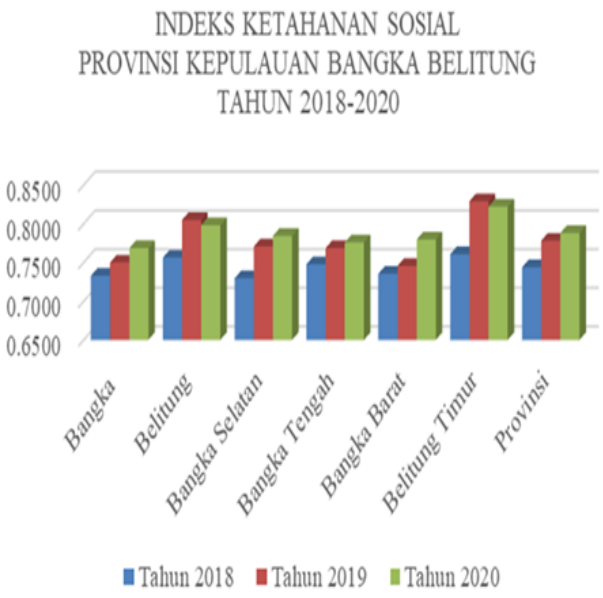

Gambar 1. *IKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Persentase kenaikan IKS terbesar berada di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2019 yaitu sebesar 9% sedangkan penurunan terbesar IKS berada di Kabupaten Belitung pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,84%. (Jumlah desa Kabupaten Belitung Timur sebanyak 39 desa, sedangkan desa di Kabupaten Belitung berjumlah 42 desa. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah desa untuk kabupaten yang ada di Pulau Bangka).

Hasil Anova menunjukkan bahwa faktor pemerintah daerah berkontribusi nyata terhadap Indeks Ketahanan Sosial. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,001 (P<0.05). Demikian pula untuk faktor tahun pengukuran IKS juga berkontribusi nyata dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (P<0,05). Hasil *two ways* Anova menunjukkan signifikasi sebesar 0,000 (P<0,05), sehingga dilakukan uji lanjut DMRT untuk mengetahui IKS kabupaten tertinggi pada periode pengukuran tahun 2018-2020.

Hasil DMRT IKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Lanjut DMRT IKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020

Pemerintah Daerah	Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2018-2020
Kabupaten Bangka	0,7504 ± 0,0177[a]
Kabupaten Belitung	0,7863 ± 0,0263[bc]
Kabupaten Bangka Selatan	0,7615 ± 0,0285[a]
Kabupaten Bangka Tengah	0,7641 ± 0,0146[a]
Kabupaten Bangka Barat	0,7536 ± 0,0232[a]
Kabupaten Belitung Timur	0,8039 ± 0,0377[c]
Provinsi Kep. Bangka Belitung	0,7700 ± 0,0233[ab]

Keterangan : - notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang signifikan (p<0,05).

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji lanjut DMRT menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur memiliki Indeks Ketahanan Sosial yang paling tinggi selama periode Tahun 2018-2020 dibandingkan dengan kabupaten lain/provinsi sedangkan untuk tahun pengukuran IKS periode 2019 dan 2020 untuk seluruh pemerintah daerah memiliki nilai IKS yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2018.

2. Dimensi IKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Dimensi IKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 2.

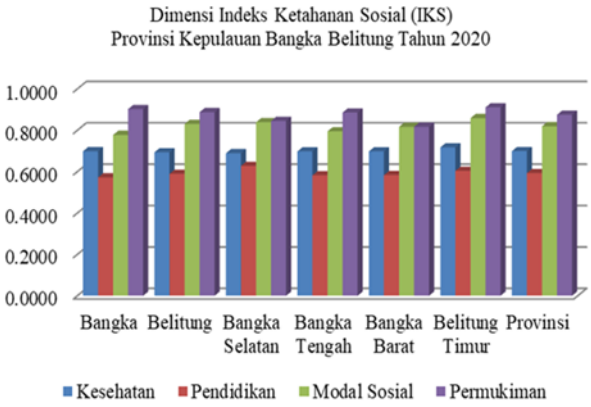

Gambar 2 Dimensi IKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa dimensi kesehatan dengan nilai tertinggi berada di Kabupaten Belitung Timur dan terendah di kabupaten Bangka Selatan. Dimensi pendidikan yang tertinggi berada di Kabupaten Bangka Selatan dan terendah di Kabupaten Bangka. Sedangkan dimensi modal sosial dengan nilai tertinggi berada di Kabupaten Belitung Timur dan terendah di Kabupaten Bangka, serta untuk dimensi permukiman nilai tertinggi berada di Kabupaten Belitung Timur dan terendah di Kabupaten Bangka Barat. Dimensi kesehatan kabupaten yang nilainya diatas provinsi yaitu Kabupaten Belitung Timur dan yang dibawah provinsi yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat dan Bangka Tengah serta Belitung. Dimensi pendidikan yang nilainya diatas provinsi yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Belitung Timur dan yang dibawah provinsi yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Belitung. Dimensi modal sosial yang nilainya diatas provinsi yaitu Kabupaten Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Belitung, sedangkan yang dibawah provinsi yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, dan Bangka Tengah. Dimensi Permukiman yang nilainya diatas provinsi yaitu Kabupaten Belitung Timur, Bangka, Belitung, dan Bangka Tengah serta yang dibawah provinsi yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Barat. Pada tahun 2020, dimensi permukiman merupakan dimensi dengan nilai tertinggi, diikuti oleh dimensi modal sosial, kesehatan, dan pendidikan.

3. Kontribusi dimensi penyusun IKS Tahun 2020

Hasil analisis regresi berganda dimensi penyusun IKS Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.

Variabel	B	Beta	Koefisien Korelasi	t hitung	Sig.
Konstanta	0,068	-	-	4,144	,000
Kesehatan	0,167	0,287	0,526	13,471	,000
Pendidikan	0,116	0,260	0,487	12,284	,000
Modal Sosial	0,398	0,563	0,725	26,573	,000
Permukiman	0,238	0,350	0,538	16,560	,000

Tabel 2. *Hasil Analisis regresi berganda dimensi penyusun IKS Tahun 2020*

F hitung = 528,045
Sig. = ,000
R square = 0,874

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) dalam uji F adalah sebesar 0,000 karena Sig. 0,000<0,05, maka sebagaimana dasar dalam pengambilan keputusan uji F dapat disimpulkan bahwa kesehatan (X1), pendidikan (X2), modal sosial (X3), dan permukiman (X4) secara simultan (bersama-sama) berkontribusi terhadap Indeks Ketahanan Sosial (Y). Besarnya angka koefisien determinasi (R square) adalah 0,874 atau 87,4% . Angka tersebut mengandung arti bahwa kesehatan (X1), pendidikan (X2), modal sosial (X3), dan permukiman (X4) secara simultan (bersama-sama) berkontribusi terhadap Indeks Ketahanan Sosial (Y) sebesar 87,4%. Sedangkan sisanya (100%-87,4 = 12,6%) dikontribusii oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Hasil uji T menunjukkan nilai Sig. keempat variabel independen 0,000 dan 0,000<0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman secara parsial berkontribusi terhadap Indeks Ketahanan Sosial. Sumbangan efektif dan sumbangan relatif variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada Tabel 3.

Variabel (X)	Sumbangan Efektif (%)	Sumbangan Relatif (%)
Kesehatan (X1)	15,10	17,28
Pendidikan (X2)	12,66	14,49
Modal Sosial (X3)	40,82	46,70
Permukiman (X4)	18,83	21,54

Tabel 3. *Sumbangan efektif dan sumbangan relatif variabel bebas terhadap variabel terikat*

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang paling dominan kontribusinya terhadap IKS adalah variabel modal sosial yaitu sebesar 40,82%. Sumbangan relatif variabel bebas terhadap IKS terbesar pada variabel modal sosial yaitu sebesar 46,70. Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil analisis diatas adalah:

$$Y = 0{,}068 + 0{,}167X1 + 0{,}116X2 + 0{,}398X3 + 0{,}238X4$$

Konstanta sebesar 0,068 menunjukkan bahwa apabila variabel kesehatan (X1), pendidikan (X2), modal sosial (X3), dan permukiman (X4) nilainya adalah 0 maka Indeks Ketahanan Sosial nilainya adalah 0,068. Koefisien regresi variabel kesehatan (X1) sebesar 0,167 artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel kesehatan mengalami kenaikan 1% maka Indeks Ketahanan Sosial akan mengalami kenaikan sebesar 0,167% atau 0,00167. Hubungan positif antara variabel independen dan dependen menyebabkan semakin meningkatnya angka variabel kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman maka Indeks Ketahanan Sosial juga semakin meningkat.

4. Matriks SWOT

Hasil analisis SWOT berupa matriks SWOT dapat dilihat pada Gambar 4.

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	Mayoritas warga sudah memiliki sumber air layak minum, jamban, dan tempat pembuangan sampah (S1)	Jarak ke sarana kesehatan terdekat masih cukup jauh (W1)
	Tersedianya akses air mandi dan mencuci untuk warga (S2)	Jumlah tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter) belum mencukupi (W2)
	Warga sudah memiliki akses aliran listrik (S3)	Belum merantaya ketersediaan poskesdes, polindes, dan posyandu serta masih belum optimalnya penyelenggaraan posyandu (W3)
	Warga sudah memiliki telepon seluler dan sinyal kuat (S4)	Jarak ke sarana pendidikan dasar dan menengah masih cukup jauh (W4)
	Tersedianya akses internet di kantor desa (S5)	Belum merantaya ketersediaan akses pendidikan non formal (PAUD, PKBM.Paket A-B-C, kursus) (W5)
	Terdapat akses internet untuk masyarakat (S6)	Belum merantaya ketersediaan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa (W6)
	Terlaksanaanya solidaritas sosial, toleransi, dan terpeliharanya rasa aman warga desa (S7)	
	Tersedianya akses ke Sekolah Luar Biasa dan penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan dan pengemis) (S8)	
PELUANG (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
Peningkatan sumber daya manusia berbasis digital (O1)	Melakukan pelatihan pemasaran produk unggulan desa berbasis e-commerce (S3, S4, O1)	Memprioritaskan bantuan sarana dan prasarana pada desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan dasar dan menengah (W1,W4, O5)
Program pendampingan dan bantuan sosial (pemerintah/swasta) (O2)	Melakukan pelatihan kewirausahaan untuk disabilitas dan penyandang kesejahteraan sosial (S8, O5)	Melibatkan pihak ketiga baik berupa hibah ataupun CSR untuk mendukung ketersediaan akses pendidikan non formal, taman bacaan, dan perpustakaan (W5, W6, O2)
Masuknya investor ke desa (O3)	Memfasilitasi investor untuk menginvestasikan modalnya di sektor-sektor unggulan desa (S7, O3)	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan berbasis digital (W3, O1, O4)
Pendidikan dan pelayanan kesehatan berbasis digital (O4)	Membuat aplikasi internet untuk bidang pendidikan dan kesehatan (S5, S6, O4)	Memfasilitasi investor untuk pembangunan klinik/rumah sakit swasta untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan (W2, O3)
Pengembangan mata pencaharian alternatif (O5)	Melakukan pengawasan dan pendampingan pemeliharaan sumber air dan sanitasi masyarakat (S1, S2, O2)	
ANCAMAN (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
Keterbatasan pendanaan program (T1)	Mengefektifkan dana bantuan program pada sektor-sektor prioritas (S1, S2, T1, T5)	Memanfaatkan CSR untuk pengadaan sarana transportasi siswa sekolah (W1, T5)
Sumber data dan pemerataan penerima manfaat masih kura	Mendata para penerima bantuan dan warga terdampak pandemik dengan memanfaatkan teknologi informasi (S4, S5, S6, T2, T6)	Meningkatkan peran aparatur desa dalam pengawasan dan pembinaan program bantuan sosial (W5, W6, T3, T4)
Pengawasan dan pembinaan masih kurang (T3)	Mengoptimalkan pengawasan bantuan sarana prasarana untuk keberlangsungan pemanfaatan (S7, S8, T3, T4)	Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kewenangan (W2, W3, W4, T1, T2, T6)
Komitmen untuk memelihara sarana dan prasarana (T4)		
Sarana transportasi yang belum memadai (T5)		
Perlindungan kesehatan dan lebihlangan pekerjaan karena pandemi Covid 19 (T6)		

Gambar 4. *Matriks SWOT*

Berdasarkan Gambar 4, dapat diketahui bahwa ada 5 (lima) strategi SO, 4 (empat) strategi SW, 3 (tiga) strategi ST, dan 3 (tiga) strategi WT sehingga total strategi yang diperoleh dari penelitian ini ada 15 (lima belas) strategi.

5. Evaluasi Strategi

Hasil analisis evaluasi strategi dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa strategi mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan sesuai kewenangan merupakan strategi dengan skor tertinggi yaitu 47.

STRATEGI	KRITERIA						
	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Perataan	Responsivitas	Ketepatan	Total Skor
Melakukan pelatihan pemasaran produk unggulan desa berbasis e-commerce (S3, S4, O1)	4	4	6	6	4	4	28
Melakukan pelatihan kewirausahaan untuk disabilitas dan penyandang kesejahteraan sosial (S8, O5)	4	4	6	5	6	5	30
Memfasilitasi investor untuk menginvestasikan modalnya di sektor-sektor unggulan desa (S7, O3)	5	7	4	4	5	6	31
Membuat aplikasi internet untuk bidang pendidikan dan kesehatan (S5, S6, O4)	6	6	6	6	5	6	35
Melakukan pengawasan dan pendampingan pemeliharaan sumber air dan sanitasi masyarakat (S1, S2, O2)	6	5	6	6	6	6	35
Memprioritaskan bantuan sarana dan prasarana pada desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan dasar dan menengah (W1,W4, O5)	5	7	7	7	7	6	39
Melibatkan pihak ketiga baik berupa hibah ataupun CSR untuk mendukung ketersediaan akses pendidikan non formal, taman bacaan, dan perpustakaan (W5, W6, O2)	5	7	6	6	8	8	40
Mengoptimalkan pelayanan kesehatan berbasis digital (W3, O1, O4)	5	5	5	5	5	6	31
Memfasilitasi investor untuk pembangunan klinik/rumah sakit swasta untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan (W2, O3)	6	6	6	6	6	6	36
Mengefektifkan dana bantuan program pada sektor-sektor prioritas (S1, S2, T1, T5)	7	7	7	7	7	7	42
Mendata para penerima bantuan dan warga terdampak pandemik dengan memanfaatkan teknologi informasi (S4, S5, S6, T2, T6)	8	8	8	8	7	7	46
Mengoptimalkan pengawasan bantuan sarana prasarana untuk keberlangsungan pemanfaatan (S7, S8, T3, T4)	5	8	7	6	7	7	40
Memanfaatkan CSR untuk pengadaan sarana transportasi siswa sekolah (W1, T5)	7	7	7	7	8	9	45
Meningkatkan peran aparatur desa dalam pengawasan dan pembinaan program bantuan sosial (W5, W6, T3, T4)	6	7	7	7	7	7	41
Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kewenangan (W2, W3, W4, T1, T2, T6)	7	8	8	8	8	8	47

Tabel 4. *Hasil Evaluasi Strategi*

PEMBAHASAN

Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk pertama kali di akhir tahun 2019 dan berkembang di Indonesia pada bulan Maret 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin, yaitu dengan menerapkan *social distancing* yang dimplementasikan melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan level yang berbeda-beda di setiap daerah. Akibatnya banyak kegiatan perekonomian yang tidak berjalan sebagaimana biasanya sehingga pendapatan masyarakatpun tertekan. Dampak yang lebih luas dari pandemic covid-19 dapat mengancam ketahanan sosial masyarakat. Namun disisi lain dampak positif dari covid-19 ini juga dapat meningkatkan kepedulian sesama masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Arie Sudjito & Fina Itriyati yang dirumuskan oleh Parahita & Winanti (2020) bahwa COVID-19 tidak hanya berdampak secara klinis pada tubuh manusia, melainkan juga relasi sosial. Terhadap relasi sosial, COVID-19 berpotensi memunculkan dua sisi sekaligus yaitu disrupsi sosial jika tidak ditangani dengan baik dan hadirnya inisiatif yang berkontribusi pada tumbuhnya solidaritas sosial. Tingginya solidaritas sosial di tengah masyarakat dapat meningkatkan ketahanan sosial.

Ketahanan sosial merupakan kemampuan masyarakat dalam mengatasi risiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Justika Baharsyah (1999) yang dikutip oleh Bahransyaf & Probosiwi (2013), ketahanan sosial, seperti juga adanya ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan nasional, merupakan suatu konsep yang diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial (yang kemudian disebut sebagai empat indikator ketahanan sosial masyarakat) (Susilowati, E. 2019).

Empat indikator ketahanan sosial masyarakat tersebut tercermin dalam salah satu komponen penyusun dimensi Indeks Ketahanan Sosial, yaitu modal sosial dalam perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Konsepsinya bahwa modal sosial merupakan sumber bagi bekerjanya sebuah sistem sosial yang akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan sosial masyarakat.

Peningkatan IDM harus mampu menjangkau semua dimensi kehidupan desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan yang memberi jalan pada pembangunan desa yang berkelanjutan yang

lekat dengan nilai, budaya dan karakteristik desa. IDM memandang penting prakarsa dan kuatnya masyarakat desa dalam proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan desa sehingga ketersediaan data dan pengukuran dalam konteks ini sangat dibutuhkan, terutama dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Sanapiah & Nugroho, 2019). Upaya meningkatkan IDM di suatu desa tidak dapat terlepas dari strategi pengoptimalan dimensi penyusun indeks komposit dimana intervensi program untuk pencapaian output dari indikator haruslah berbasis pada kewenangan. Intervensi ini dapat dilaksanakan melalui program yang dilaksanakan oleh pusat, provinsi, kabupaten, desa, dan sosial/alami (Kementerian Desa PDTT, 2020). Pemerintah desa memegang peranan kunci, sehingga diperlukan kejelian dalam memetakan dan menyusun strategi program yang sesuai untuk meningkatkan indikator dimensi yang masih rendah. Hal ini untuk memastikan bahwa strategi program tersebut selain tepat sasaran diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan kewenangan desa. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, kedudukan desa didalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan perwujudan sebagai masyarakat pemerintahan *(self governing community)* sekaligus pemerintahan lokal desa *(local self government).* Sehingga Pemerintah desa diharapkan mampu bertindak menjalankan perannya sebagai struktur pemerintahan, sebagai pelayan masyarakat desa, dan sebagai agen penggerak perubahan masyarakat desa untuk mencapai desa mandiri. Peran kunci pemerintahan desa telah ada sejak zaman kerajaan berkuasa di Nusantara Prasati Himad Walandit (1350) yang menyebutkan, bahwa Pemerintah Hindia Belanda pun mengakui legalitas desa dalam Staatsblad Tahun 1906 Nomor 83 dan Staadblad Tahun 1938 Nomor 490, dimana Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan asset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu dipertegas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Amalia & Syawie, 2015).

IKS provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018-2020 memposisikan Kabupaten Belitung Timur sebagai IKS tertinggi diantara kabupaten lainnya dan selalu berada di atas IKS provinsi. Hal ini memungkinkan, karena jumlah desa di Kabupaten Belitung Timur paling sedikit di antara kabupaten lainnya yaitu sebanyak 39 desa. Persebaran desanya pun relatif mengikuti jalan provinsi/kabupaten dan hampir merata jaraknya dengan ibu kota kecamatan, sehingga memudahkan masyarakatnya untuk mendapatkan akses sarana prasarana. Setiap desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan besaran dana desa dan alokasi dana desa yang tidak jauh berbeda, hanya saja secara postur pendapatan di APBDes bisa berbeda jauh apabila desa mampu untuk meningkatkan PADesa dan mendapatkan hibah dari pihak ketiga/perusahaan. Pada poin ini kemampuan manajerial dan kepemimpinan Kepala Desa serta kapasitas aparaturnya memegang peranan penting. Garda yang paling depan dalam menjalankan pelayanan publik guna menjamin kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi faktor penentu keberhasilan dari program pemerintah

adalah aparatur desa. Meningkatkan kapasitas aparatur desa menjadi suatu tindakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Rodiyah et al., 2021).

Desa-desa di Kabupaten Belitung Timur memiliki keuntungan ini yaitu peran dari kuatnya koordinasi dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dan Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga hampir di semua indikator IKS, pemerintah desa dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan maksimal terutama pada indikator dimensi modal sosial. Pemerintah desa mampu untuk menjaga solidaritas sosial dengan tetap melestarikan budaya gotong royong, menyediakan ruang publik, dan sarana olahraga masyarakat. Selain itu, toleransi beragama dan keamanan desa didukung dengan baik oleh masyarakat sehingga konflik di desa dapat ditekan dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Fitriansyah (2020), bahwa ketersediaan rasa saling percaya di dalam masyarakat (*stocks of social trust*), norma-norma, dan jejaring yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bersama dapat dikatakan sebagai modal sosial. Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi cenderung bekerja secara gotong royong serta mampu dalam mengatasi permasalahan.

Terlaksananya pembangunan desa merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan motivasi tentang bagaimana masyarakat di pedesaan dapat memahami dirinya sendiri, termasuk kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Tindakan konkrit yang bisa dilakukan yakni, penyediaan berbagai input serta memberikan akses pendukung potensi yang bisa membuat masyarakat menjadi makin berdaya, yakni dengan memberikan kepercayaan kepada mereka dalam mengelola input dan peluang tersebut untuk terus berkembang dan sejahtera (Amalia & Syawie, 2015).

Tren pencapaian IKS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak selalu mengalami kenaikan, seperti pada tahun 2020 di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung terjadi penurunan IKS. Hal ini mengindikasikan bahwa menurunnya pencapaian indikator dimensi IKS di salah satu desa berkontribusi signifikan terhadap IKS kabupaten secara keseluruhan. Menurut Tenaga Pendamping Profesional "Konflik sosial akibat aktivitas pertambangan rakyat yang jamak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya menggerus nilai IKS terutama dimensi modal sosial tetapi juga berkontribusi terhadap dimensi IKL seperti dimensi kualitas lingkungan dan potensi bencana alam". Oleh karena itu, pemerintah desa harus responsif terhadap potensi-potensi konflik dan harus mampu meredamnya dengan melibatkan aparat hukum terkait. Sebagai gambaran umum yang terjadi selama ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pemicu konflik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir menurut Bidayani & Kurniawan (2020) dikelompokkan menjadi 4 (empat) isu, yaitu 1) isu lingkungan berupa kerusakan terumbu karang, pendangkalan dan menurunnya kualitas air, 2) isu sosial meliputi pendidikan anak, kesehatan nelayan dan kesempatan kerja, 3) isu pelanggaran hukum, yaitu muncul tambang inkonvensional yang ilegal, serta 4) isu ekonomi, yaitu disebabkan oleh disparitas pendapatan antara nelayan dengan penambang timah.

Pada tahun 2020, dimensi penyusun IKS yaitu kesehatan, modal sosial, dan permukiman tertinggi berada di Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan untuk dimensi pendidikan, nilai yang tertinggi adalah Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten

Belitung Timur memiliki desa mandiri yang paling banyak di antara kabupaten lainnya yaitu 7 (tujuh) desa mandiri atau sekitar 18%, ditandai dengan keberadaan desa mandiri yang mampu menstimulus perkembangan desa di sekitarnya. Disamping itu, desa mandiri mampu memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan ekonomi dan memfasilitasi pembangunan sarana penunjang ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada berkurangnya pengangguran serta bertambahnya mata pencaharian masyarakat. IDM disusun oleh indeks komposit yang memiliki korelasi positif satu sama lain. Naiknya IKE yang ditandai dengan tercapainya indikator keberagaman produksi, perdagangan, akses distribusi, akses kredit, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah berhubungan dengan naiknya IKS yang ditandai dengan tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan, permukiman, dan modal sosial (Afifah & Kusumastuti, 2018). Untuk dimensi pendidikan yang tertinggi di Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan sebaran sarana pendidikan dasar-menengah yang lebih merata atau tidak terpusat di dekat ibukota kecamatan saja, sehingga bisa diakses oleh peserta didik dari banyak desa. Kegiatan Paud, PKBM, dan kursus serta perpustakaan desa telah difasilitasi pemerintah desa, baik melalui APBDesa maupun bantuan pihak ketiga/CSR. Kondisi ini sesungguhnya hampir mirip di setiap kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya saja komitmen setiap pemerintah desa dan dukungan Bupati menjadi kunci pencapaian di Kabupaten Bangka Selatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa permukiman menjadi dimensi dengan nilai tertinggi sedangkan pendidikan menjadi dimensi dengan nilai terendah. Evaluasi ketercapaian indikator dari masing-masing dimensi memberikan potensi seberapa besar peningkatan nilai yang dapat dilakukan melalui intervensi program sesuai kewenangan. Potensi peningkatan tertinggi berada pada dimensi pendidikan yaitu sebesar 40,71%, diikuti oleh kesehatan (40,09%), modal sosial (18,06%), dan permukiman (12,53%). Nilai dimensi permukiman tinggi artinya masyarakat sudah memiliki akses untuk air bersih dan layak minum, fasilitas sanitasi, fasilitas listrik, dan fasilitas informasi dan komunikasi. Menurut Kementerian Desa PDTT (2020), kesemua akses terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud dapat diintervensi oleh program pusat, provinsi, kabupaten, desa, dan sosial/alami. Capaian nilai dimensi permukiman ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan di desa dapat dikategorikan tepat sasaran dan output yang diharapkan telah tercapai walaupun nilai tersebut masih bervariasi pada masing-masing desa.

Nilai dimensi pendidikan rendah artinya masyarakat/peserta didik masih sulit mengakses sarana pendidikan dasar-menengah yang disebabkan jarak yang terlalu jauh dan belum tersedianya sarana transportasi yang memadai. Pelaksanaan kegiatan Paud belum optimal karena bergantung pada ketersediaan peserta didik karena umumnya anak usia dini diasuh sendiri oleh ibu/nenek. Kegiatan PKBM/Pake A-B-C dan kursus masih sedikit, terbatas di desa-desa tertentu saja, umumnya yang dekat dengan ibukota kabupaten serta ketersediaan perpustakaan desa yang belum merata disebabkan prioritas penggunaan dana desa yang berbeda-beda di masing-masing desa. Akses pendidikan dasar-menengah pertama dan PKBM/Paket A-B-C hanya dapat diintervensi oleh program kabupaten/DAK fisik bidang pendidikan sedangkan pendidikan menengah atas oleh program provinsi/DAK fisik bidang pendidikan. Kegiatan Paud dan perpustakaan desa dapat

diintervensi oleh program kabupaten, desa, dan sosial/alami. Sedangkan untuk kegiatan kursus dapat diintervensi oleh program provinsi, kabupaten, desa, dan sosial/alami (Kementerian Desa PDTT, 2020). Permasalahan akses pendidikan dasar-menengah dan PKBM/Paket A-B-C ini bukan hanya soal ketersediaan sarana pendidikannya saja tetapi juga kemampuan masyarakat/peserta didik untuk mendapatkan jangkauan layanannya, sehingga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak CSR perusahaan yang diarahkan untuk penyediaan bus sekolah. Pemerintah desa dapat memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa salah satunya adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan (Kementerian Desa PDTT, 2019).

Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa dimensi kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman baik secara parsial maupun simultan (bersama-sama) berkontribusi terhadap IKS. Hubungan yang terbentuk bernilai positif sehingga peningkatan nilai pada dimensi apapun akan menyebabkan peningkatan pada IKS. Koefisien determinan sebesar 87,4% menunjukkan bahwa formulasi pemilihan dimensi penyusun IKS masih memungkinkan untuk ditambahkan dimensi lain, misalnya dimensi kebudayaan. Persentase sumbangan efektif variabel bebas terhadap IKS menunjukkan secara parsial bahwa dimensi modal sosial memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 40,82%, diikuti permukiman (18,83%), kesehatan (15,10%), dan pendidikan (12,66%). Apabila hasil analisis ini disandingkan dengan potensi peningkatan nilai, dapat disusun prioritas intervensi program untuk meningkatkan IKS dan IDM akan lebih efektif yaitu pertama pada dimensi modal sosial, kedua pada dimensi kesehatan, ketiga pada dimensi pendidikan, dan keempat pada dimensi permukiman. Kaidah desa membangun memberikan ruang untuk meningkatnya wewenang pemerintah desa untuk berinisiatif memutuskan kegiatan dan anggaran pembangunan sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten tidak lepas dari koridor desentralisasi dan otonomi desa (Irawan, 2017).

Menurut Pengelola Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Satker P3MD), "setelah IDM ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT, dilaksanakanlah rapat koordinasi sebagai tindak lanjut yang difasilitasi oleh Satker P3MD dengan menghadirkan tim IDM dari Kementerian Desa PDTT, organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten antara lain dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa serta Bappeda, Tenaga Pendamping Profesional (TPP), camat, dan kepala desa. Permasalahan penyebab turunnya IDM dan indeks kompositnya dibahas dan kuesioner IDM yang telah diisi oleh desa merupakan titik awal untuk penyusunan strategi intervensi dalam mengkoordinasikan program-program sesuai kewenangan masing-masing".

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap peningkatan IKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi internal maupun eksternal yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), sedangkan analisis eksternal mencakup faktor peluang (*opportunity*) dan

ancaman/tantangan (*threaths*). Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator pada IKS memposisikan indikator dimensi penyusun IKS yaitu dimensi permukiman dan modal sosial sebagai faktor kekuatan, sedangkan untuk dimensi kesehatan dan pendidikan sebagai faktor kelemahan. Analisis eksternal yang dilakukan tidak hanya terkait faktor eksternal yang dapat menjadi peluang atau ancaman terhadap IKS, tetapi juga termasuk faktor ketidakpastian dan hal yang diluar kontrol pemerintahan desa. Hasil analisis SWOT menunjukkan ada 8 (delapan) kekuatan, 6 (enam) kelemahan, 5 (peluang), dan 6 (enam) tantangan. Menurut Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "pemerintah desa masih perlu diberikan penguatan terkait bagaimana mengoptimalkan potensi desa yang dimiliki, mengantisipasi potensi konflik dan bencana alam, serta melakukan kerjasama baik antar desa maupun dengan pihak ketiga. Selain itu, tantangan yang ditemui adalah kemampuan pemerintah desa untuk mengakomodir hal-hal tersebut ke dalam perencanaan desa. Oleh sebab itu, pendampingan oleh Tenaga Pendamping Profesional perlu untuk tetap dilaksanakan di setiap desa".

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (peluang dan tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (kekuatan dan kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal (Hisyam, 1998). Hasil analisis menunjukkan ada 15 (lima belas) strategi yang dihasilkan dan mencakup program/kegiatan yang dapat diintervensi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, dan sosial/alami. Dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, terdapat 4 (empat) tujuan yang berhubungan dengan peningkatan ketahanan sosial yaitu meningkatnya ketersediaan infrastruktur, meningkatnya pendidikan masyarakat, meningkatnya pembangunan sosial masyarakat, dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Tujuan ini kemudian dibreakdown menjadi 9 (sasaran) dan 10 (sepuluh) strategi serta 10 (sepuluh) arah kebijakan. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 terdapat 28 (dua puluh delapan) program pemerintah provinsi yang dapat digunakan untuk meningkatkan IKS."

Penentuan suatu strategi sangat terkait dengan perubahan internal dan eksternal pemerintah/organisasi, agar tercapai kecocokan organisasional (*organizational fitness*). Salah satu faktor eksternal yang saat ini sangat berkontribusi terhadap pemilihan strategi dan kebijakan adalah pandemik Covid-19. Penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 mengharuskan setiap level pemerintahan untuk melakukan *refocusing* anggaran sehingga berkontribusi terhadap pencapaian output tahunan ataupun keberlanjutan suatu program/kegiatan. Evaluasi strategi dilakukan untuk mendapatkan strategi yang paling efektif, efisien, mencukupi, merata, responsif, dan tepat. 3 (tiga) besar strategi dengan score tertinggi yaitu mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kewenangan (47), mendata para penerima bantuan dan warga terdampak pandemik dengan memanfaatkan teknologi informasi (46), dan memanfaatkan CSR untuk pengadaan sarana transportasi siswa sekolah (45).

Pengoptimalan penggunaan anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan sesuai kewenangan merupakan strategi yang dipilih untuk menyusun

kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatan ketahanan sosial. Kebijakan merupakan suatu keputusan politis yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk mengatasi masalah dan persoalan publik (Afifah et al., 2016). Kebijakan tersebut diimplementasikan dengan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan nomenklatur dari urusan yang menjadi persoalan publik. Ada 15 (lima belas) program yang dapat digunakan untuk mengintervensi dimensi kesehatan dan pendidikan. Pemilihan program ini sesuai dengan hasil analisis regresi linier dan potensi peningkatan nilai IKS. Jenis Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan substantif dan kebijakan prosedural yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah atas masalah tertentu dan bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

Menurut Tim penyusun RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, bahwa "tidak semua program mendapatkan anggaran. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan mengalami *refocusing*, sehingga tidak dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2020". Dalam hal ini, pemerintah dihadapkan pada situasi keterbatasan sumber daya di satu sisi dan masalah-masalah publik yang makin kompleks di sisi yang lain, maka pemerintah tidak mungkin menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara bersamaan. Namun demikian, agar tidak menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan, pemerintah dituntut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan bijaksana. Oleh karena itu Pemerintah harus menentukan pilihan penyelesaian masalah-masalah publik tersebut berdasarkan prioritas. Menurut Analis Kebijakan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada masa pandemik ini upaya peningkatan pencapaian output dapat dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial), hanya saja dari sisi perencanaan kebanyakan perangkat daerah belum menentukan lokus/desa sasaran/penerima manfaat di rancangan awal-akhir sehingga realisasi kinerja menjadi tidak maksimal". Oleh karena itu, kedepannya sinkronisasi antara perencanaan di level desa dengan perencanaan di level provinsi menjadi penting, agar pemerintah desa dapat turut andil dan berperan aktif mendukung melalui anggaran desanya masing-masing. Selanjutnya, kebijakan peningkatan ketahanan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah memprioritaskan anggaran bantuan pada lokus/desa yang mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan bantuan sarana prasarana, pembinaan, dan pengawasan bantuan sosial. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kontribusi penerapan kebijakan tersebut terhadap peningkatan ketahanan sosial di tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Penyusun Indeks Ketahanan Sosial yang terdiri dari 4 (empat) dimensi baik secara bersama-sama maupun secara parsial berkontribusi terhadap Indeks Ketahanan Sosial dan modal sosial merupakan dimensi dengan kontribusi terbesar (40,82%). Kebijakan peningkatan ketahanan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memprioritaskan anggaran bantuan pada lokus/desa yang mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan bantuan sarana prasarana, pembinaan, dan pengawasan bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, F., Dian, dan Neneng, Y.Y. 2016. Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (*Trafficking*)

Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. Jurnal CosmoGov, Vol.2 No.2, Oktober 2016. ISSN 2442-5958. E-ISSN 2540-8674.

Afifah, M.N. dan Kusumastuti, N. 2018. "Strategi Mempercepat Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Kemadang Gunung Kidul)". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* (2) : 177-198.

Amalia, A.D. dan Syawie, M. 2015. "Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi". *Jurnal Sosio Informa* 1 (2): 175–188.

Bachtiar, P. P., Kurniawan, A., Sedyadi, G. S. M., Diningrat, R. A., Ruhmaniyati, R., dan Alifia, U. 2018. "Pemanfaatan Dana Desa". *Buletin SMERU* (2) : 1-16.

Bahransyaf, D. dan Probosiwi, R. 2013. Membangun Ketahanan Sosial di Desa Serakapi: *Sebuah Replikasi Model Building Social Resilience in Serakapi Village: A Model Replication*. Jurnal PKS. Vol 12 No 3.

Bidayani, E. dan Kurniawan (2020). Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir antara Nelayan dengan Penambang Timah Inkonvensional. Jurnal Society, 8 (1), 14-24, 2020 PISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874.

Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama.

Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Fitriansyah. 2020. "Kajian Kebijakan Modal Sosial dalam Menyelesaikan Konflik Tambang pada Masyarakat Pesisir". Jurnal Reformasi Volume 10 Nomor 2 (2020). ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online).

Parahita, G.D dan Winanti, P.S. 2020. Policy Brief: Penguatan Solidaritas Sosial di Tengah Krisis Covid-19. Serial Diskusi #4 Fisipol UGM. Yogyakarta.

Hastuti, Ruhmaniyati, dan Dyan W. 2020. Pelaksanaan PKH dan Program Sembako dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid 19. Catatan Penelitian Smeru No. 2/2020. SMERU. Jakarta.

Hisyam, M.S. 1998. *Analisis SWOT Sebagai Langkah Awal Perencanaan Bisnis*. Makalah. SEM Institute. Jakarta.

Irawan, N. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Rodiyah, I., Sukmana, H., dan Choiriyah, I.U. 2021. Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. ISSN: 2541-2515(p), 2541-2035(e). Volume: 6 (1)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta: Kemkumham RI.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2020. *SOP Update Data Indeks Desa Membangun Tahun 2020*. Jakarta.

Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: Pustaka Setia.

Sanapiah, A.A dan Nugroho, S. 2019. Implementasi Indeks Desa Membangun dalam Mendorong Perkembangan dan Kemandirian Desa di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Journal of Public Policy and Applied Administration Vol.1 (1): 50-60.

Sudjana, N. 2004. *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Rosda.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif*. Bandung: Alfabeta.

Susilowati, E. (2019). Penerapan Teknologi Pengembangan Masyarakat pada Program Desa Sabilulungan. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos), 1*(1).

Supranto, J. 2010. *Analisis Multivariat Arti dan Interpretasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Winarsunu, T. 2017. *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Malang: UMM Press.